

NALAR KRITIS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN TANTANGAN DEMOKRASI KEBANGSAAN DI NEGARA PLURALIS

Nanang Faisol Hadi
UINSI Samarinda, Indonesia
e-mail: nanangelhadi6@gmail.com

Abstrak (Indonesia)

Received:15
Desember
2021
Revised :25
Desember
2021
Accepted:05
Januari
2022

Latar Belakang: Artikel ini menganalisis bagaimana pendidikan islam dan tantangan demokrasi kebangsaan di tengah-tengah negara pluralis Amerika Serikat. Negara yang sangat kompleks dalam berbagai kebutuhan hidup manusia, termasuk dalam bidang privasi beragama.

Tujuan: Tujuan Penelitian ini berorientasi pada usaha untuk menghargai dan kontekstualisasi klaim agama islam yang sesuai dengan cita-cita pendidikan yang reflektif, berpikir rasional, saling menghormati, dan kesetaraan dalam kewarganegaraan.

Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan library research.

Hasil: Hasil penelitian ini yaitu menerapkan perspektif Islam liberal dan progresif dalam pendidikan mendorong siswa muslim untuk mengembangkan kapasitas berpikir kritis, penalaran moral, dan musyawarah demokratis. Mereka belajar untuk mengenali politik interpretasi agama, untuk mengkontekstualisasikan dan menghistoriskan pengetahuan Islam, dan bagaimana hal itu mungkin dipengaruhi oleh sosial, sejarah, dan politik pasukan.

Kesimpulan: Keterbatasan dalam menerapkan pendidikan Islam di Amerika Serikat berkaitan dengan kualitas guru. Setengah dari guru studi Islam tidak bersertifikat atau lisensi yang diperlukan untuk pendidikan. Pendidikan Islam liberal dan maju mendorong siswa muslim untuk membangun jiwa

kritis dan sikap percaya diri tentang ajaran Islam sehingga mereka mengkomunikasikan agamanya secara cara yang meyakinkan dan deliberatif.

Kata kunci: *Implementasi pluralis; pendidikan islam; demokrasi kebangsaan*

Abstract

Background: *This article analyzes how Islamic education and the challenges of national democracy in the midst of the pluralist state of the United States. A country that is very complex in various needs of human life, including in the field of religious privacy.*

Objective: *The purpose of this research is oriented towards efforts to appreciate and contextualize Islamic religious claims in accordance with educational ideals that are reflective, rational thinking, mutual respect, and equality in citizenship.*

Methods: *The method used in this research is qualitative with library research.*

Results: *The results of this study are that applying a liberal and progressive Islamic perspective in education encourages Muslim students to develop the capacity for critical thinking, moral reasoning, and democratic deliberation. They learn to recognize the politics of religious interpretation, to contextualize and historicalize Islamic knowledge, and how it might be influenced by social, historical, and political forces.*

Conclusion: *Limitations in implementing Islamic education in the United States relate to teacher quality. Half of Islamic studies teachers are not certified or licensed for education. Liberal and advanced Islamic education encourages Muslim students to build a critical spirit and a confident attitude about Islamic teachings so that they communicate their religion in a convincing and deliberative way.*

Keywords: *Pluralist implementation; Islamic education; national democracy*

*Correspondent Author : Nanang Faisol Hadi

Email : nanangelhadi6@gmail.com



PENDAHULUAN

Salah satu tantangan yang dihadapi umat Islam di masyarakat Barat (AS, Kanada, dan Eropa) adalah untuk mempertahankan identitas khususnya. Pada saat yang sama mereka harus terlibat secara aktif dalam kehidupan budaya, sosial, dan politik masyarakat tersebut. Hidup di negara yang mayoritas beragama Kristen, pluralistik, sekuler, dan demokratis membutuhkan adaptasi lebih untuk membantu anak-anak Muslim mengembangkan diri dan memiliki identitas keagamaan, kebangsaan, modern, dan demokrasi². Masalah keberagaman, kebebasan beragama, kebangsaan, kesetaraan gender, dan partisipasi politik bertentangan dengan Islam konservatif (seperti yang dikembangkan di negara-negara mayoritas Muslim dan non-demokratis). Hidup dalam pluralistik dan sekuler sering mempengaruhi umat Islam untuk memikirkan kembali cara beragama mereka sehingga mampu menyesuaikan dengan tuntutan kehidupan yang beragam dan modern. Cendekiawan bersepakat bahwa Islam bukanlah agama monolitik dan umat Islam di seluruh dunia memiliki budaya dan tradisi yang berbeda³. Bagi banyak muslim, Islam dianggap sebagai pandangan dunia ideologis mereka, yang terdiri dari seperangkat keyakinan, praktik, dan nilai-nilai⁴.

Pendidikan Islam, seperti pendidikan lainnya, dipengaruhi oleh berbagai ideologi dan proses sekularisasi, modernisasi, islamisasi, dan radikalisme. Secara garis besar, kita dapat mengkaji pendidikan Islam yang berkaitan dengan isu-isu demokrasi, modernitas, dan penerapan syariat Islam. Salafisme sebagai manifestasi Islam konservatif dan pendidikan Islam fundamental, dan Islam liberal yang mendukung pemikiran Islam kritis dan pendidikan Islam progresif. Salafisme mendukung interpretasi literalisme dan eksklusivisme Quran dan hadits⁵. Menolak demokrasi dengan alasan hanya Tuhan yang memiliki kedaulatan dan bukan manusia. Hal ini mutlak dan menjadi transmisi rasional teks agama. Di sisi lain, liberal dan progresif Muslim berpendapat bahwa Islam kompatibel dengan demokrasi. Mereka menolak monopoli atas hermeneutika agama atau literal interpretasi teks-teks Islam. Mereka mendukung kesetaraan hidup dalam kewarganegaraan bagi semua warga negara dan persamaan hak bagi perempuan.⁶

Pada saat yang sama, ide-ide Islam liberal atau progresif diperdebatkan di dalam dunia Islam. Komunitas agama yang berbeda dapat menafsirkan konsep-konsep ini berdasarkan latar belakang teologis, interpretasi nilai demokrasi, life style, karakteristik sosiopolitik dan sejarah negara. Bahkan dalam berbagai literatur terdapat berbagai kritik yang berkembang terhadap pendidikan Islam di

Barat dan sejauh mana mereka berhasil mempersiapkan siswa muslim untuk kehidupan yang demokratis dan pluralistik. Misalnya, banyak sekolah di AS yang menerapkan kurikulum Islam, yang diadopsi dari negara mayoritas Muslim. Yang dipaksakan relevansinya dengan kehidupan multikultural, beragam, dan demokratis di mana mereka tinggal saat ini. Kurikulum ini tidak mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis, menuangkan ide, dan terlibat dalam debat sebuah kajian. Mereka fokus pada pembelajaran hafalan seperti membaca dan menghafal bab-bab dari Quran dan tradisi nabi. Pendidikan agama model Salafi ini, mendominasi dunia Islam (masjid, madrasah, dan sekolah Islam) saat ini. Ia membatasi pengembangan identitas keagamaan dan kewarganegaraan siswa muslim karena terlalu bergantung pada pendekatan agama yang berorientasi pada transmisi dan berpusat pada guru. Efek lainnya ialah menumbuhkan monopoli atas pengetahuan agama dan pendekatan yang tidak kritis terhadap kontribusi para ahli hukum islam terdahulu. Pendidikan Islam di AS yang bertumpu pada ideologi islam salafi tidak sesuai dengan kehidupan yang demokratis dan multikultural masyarakat karena percaya bahwa hanya ada satu mazhab penafsiran kitab suci, agama, dan hukum yang benar. Salafisme berkaitan dengan gerakan Wahabisme yang menolak ambiguitas, relativisme, atau inovasi teologis dan menekankan kekakuan, stabilitas dan keteraturan kognitif dalam menghadapi tantangan dan dinamisme kehidupan modern. Pendidikan berdasarkan salafisme dapat mengarah pada ide-ide ekstremisme, konflik dan intoleransi terhadap non-muslim dalam masyarakat yang lebih luas⁷

Tidak ada sekolah Islam di Amerika Serikat yang akan mengidentifikasi dirinya dengan filsafat pedagogis progresif. Sebagian besar tulisan tentang Islam liberal dan progresif dikembangkan dari perspektif politik atau teologis dan tidak ada hubungan langsung dengan kebijakan, praktik, progresif dan pedagogik pendidikan Islam untuk mengkonseptualisasi pendidikan yang lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat yang demokratis dan pluralistik⁸. Islam liberal dan progresif begitu menghargai pemikiran rasional yang dikenal dengan ijtihad dan teologis inovasi mendorong tumbuhnya intelektualisme Islam. Memfasilitasi siswa muslim dengan pemahaman kritis tentang agama, sejarah, dan politik.

Artikel ini diarahkan kepada pendidikan Islam di AS karena masyarakat Amerika sangat beragam dalam hal agama, budaya, dan pandangan dunia. Adanya kontroversi tentang kemungkinan dan batasan pendidikan Islam di negeri ini. Mengupas apakah pendidikan itu mengisolasi atau mengintegrasikan siswa muslim dalam masyarakat yang lebih luas. Misalnya, kritikus sekolah Islam berpendapat bahwa kurangnya pluralisme agama di sekolah-sekolah mencegah semangat diskusi dan toleransi sebagai ciri utama dalam demokrasi liberal.

Diperkirakan ada 250 sekolah Islam dan 3200 siswa muslim di AS. Sebagian besar sekolah Islam di AS adalah sekolah dasar dan menengah dan mereka mengajarkan mata pelajaran dasar (matematika, sains, dan sastra) serta

studi Islam dan bahasa Arab. Studi Islam mencakup ibadah dalam Islam, sejarah Islam, ajaran moral Al-Qur'an dan Hadits, dan sejarah nabi Muhammad. Pengajaran ini bertujuan untuk menanamkan rasa identitas pribadi dan jamaah berdasarkan ajaran spiritual, etika, dan moral yang bersumber dari Al-Qur'an, Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi⁹.

Selanjutnya studi islam yang diajarkan itu lebih dikenal dengan syaria. Syaria selalu menjadi kajian utama dalam kehidupan muslim dan pemikiran Islam. Seperti yang difirmankan Tuhan bahwa syaria berfungsi membimbing umat manusia pada jalan yang benar. Dalam artian untuk mengatur kehidupan individu dan jamaah, dari permasalahan ibadah hingga perdagangan, peperangan hingga hubungan keluarga. Syaria di banyak sekolah Islam mengintegrasikan politik, sosial, dan ekonomi islam serta kehidupan individu menjadi satu pandangan dunia religius. Penerapan syaria dalam kehidupan modern dan bagaimana menginformasikan pendidikan Islam kepada publik dipengaruhi juga oleh ketegangan antara pendekatan konservatif dengan interpretasi islam liberal.

Perdebatan mengenai fenomena pluralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menarik untuk dikaji. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keharaman pluralitas pada tahun 2005 yang menyamakan pluralitas dengan liberalisme dan sekularisme memberikan respon kritis di kalangan intelektual muslim terhadap fatwa tersebut. Terdapat banyak tulisan yang sangat kritis untuk pemaknaan pluralitas sempit tersebut diantaranya M. Dawam Rahardjo: *Mengapa Semua Agama Itu Benar?* (2006), Martin Lukito Sinaga: *Agama Tanpa Sosiologi Agama, Meninjau Wacana Pluralisme di Indonesia* (2006), Trisno S. Susanto: *Membaca (kembali) Politik Pluralisme, Catatan untuk Martin Lukito Sinaga* (2006). Kedua tulisan ini mengkritisi fatwa pluralisme oleh MUI yang miskin perspektif dan memantik kontroversi. Sedangkan tulisan Rahardjo, menurutnya dalam menghadapi keberagaman kita membutuhkan pluralisme. Konsekuensinya yaitu jika satu pihak menerima pluralitas sebagai realitas sedangkan pihak lain menolak pluralisme sebagai suatu paham.²¹

Berangkat dari ulasan di atas maka peneliti perlu menguraikan secara detail beberapa kontain yang berkaitan dengan demokrasi kebangsaan yang berlaku di AS, ulasan islam konservatif salafi dan islam liberal progresif, implementasi Pendidikan islam di negara pluralis, dan islamisasi pendidikan dan demokrasi di AS. Hal ini bertujuan agar orientasi pada usaha untuk menghargai dan mengontekstualisasikan klaim agama islam yang sesuai dengan cita-cita pendidikan yang reflektif, berpikir rasional, saling menghormati, dan kesetaraan dalam kewarganegaraan di negara pluralis AS dapat tercapai dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research)¹⁰. Untuk memperoleh informasi terkait konsep pendidikan islam dan demokrasi kebangsaan di AS diperlukan beberapa literatur, jurnal, buku buku, artikel dan referensi lain yang sesuai dengan kebutuhan penulisan artikel ini. Studi kepustakaan dapat mempertajam konsep teoritis dan memperkaya informasi tentang karya ilmiah dan penelitian yang sejenis. Berbagai informasi yang telah didapatkan dari berbagai literatur dapat dijadikan sebagai kajian konsep pendidikan islam dan demokrasi kebangsaan AS sebagai sumber yang terkini, mampu memberi pandangan yang berbeda dan pemutakhiran dari berbagai bahan sejenis yang ditulis oleh beberapa penulis sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHSAN

Islam Liberal dan Progresif; Menjawab Tantangan Zaman

Ide islam liberal dan progresif dalam literatur pada dasarnya berfokus pada implementasi dan interpretasi hukum islam (syariah). Bagaimana mereka menyesuaikan dengan kondisi kehidupan yang dinamis dalam masyarakat Islam dan non-Islam. Faktanya, Islam liberal memiliki sebuah gagasan dan pemikiran progresif dalam memahami dan menafsirkan teks agama berkaitan dengan isu-isu demokrasi, hak perempuan, hak non-muslim, kebebasan berpikir, dan makna kemajuan¹¹. Interpretasi setiap teks keagamaan tidak bisa dilepaskan dari wacana kekuasaan atau komitmen sosiopolitik dalam penafsirannya. Teologi dan pengetahuan agama tidak selalu cocok untuk semua waktu dan tempat. Jika dipaksakan itu dapat mempertahankan status quo untuk kepentingan elit sosial, agama, dan politik dalam masyarakat.¹² Ada tiga mode Islam liberal: syariah liberal, syariah bisu, dan syariah tafsir. Pendukung syariah liberal mengklaim bahwa liberal telah diartikulasikan dalam interpretasi sebelumnya dan dipraktikkan dalam sejarah Islam. Mereka menghindari tuduhan tidak autentik dengan membumikan posisi liberal yang kokoh dalam sumber-sumber Islam ortodoks. Syariat bisu berpendapat bahwa wahyu Tuhan tidak mencakup semua topik kehidupan manusia dan ada ruang bagi umat Islam untuk mempertimbangkan apa yang baik bagi mereka berdasarkan budaya, kebutuhan, sumber daya yang tersedia, dan kondisi kehidupan. Syariah tafsir berarti bahwa syariah itu prerogative ilahi, tetapi interpretasi manusia saling bertentangan dan bisa salah. Ulama telah memperdebatkan banyak isu mengenai hubungan antara agama dan politik. Dalam menafsirkan syariat titik tekannya adalah penafsiran ulama tentang agama tidak selalu suci dan selalu benar. Bisa saja salah, dapat diperdebatkan, dan memungkinkan diinterpretasi ulang.

Tidak ada definisi yang jelas tentang Islam progresif. Muslim progresif percaya bahwa setiap kehidupan manusia (perempuan dan laki-laki, Muslim dan non-muslim, kaya atau miskin, utara atau selatan) memiliki nilai intrinsik yang sama persis. Mereka mendorong umat Islam untuk mempertanyakan struktur ketidakadilan yang dibangun ke dalam pemikiran Islam. Mereka memiliki pemahaman kritis tentang Islam yang menolak penindasan atas dasar gender, etnis, dan warna kulit. Mereka mengutuk semua jenis kekerasan terhadap warga sipil, apakah kekerasan itu datang dari kelompok teroris atau negara¹³. Islam progresif mendorong siswa untuk mengembangkan rasa religiusitas kritis dan kemampuan untuk mengkaji agamanya sendiri. Mengenali keragaman tradisi Islam dan mencari keadilan dengan cara membandingkan dan mengkontraskan spektrum yang luas dari interpretasi keagamaan. Singkatnya, ia mempromosikan wacana pendidikan yang sesuai dengan cita-cita hak asasi manusia, keadilan sosial, demokrasi, dan pluralisme.

Pendidikan Islam progresif dan liberal seharusnya membantu umat Islam mengembangkan kesadaran diri dan identitas percaya diri. Siswa mampu memahami maknanya implikasi Islam sebagai agama universal dan peka budaya. Islam progresif memberikan pendidikan kepada siswa dengan ruang terbuka dan aman untuk melakukan inovasi, melibatkan diri, dan berpotensi mengeksplorasi tradisi¹⁴. Pendidikan Islam Progresif mengandalkan pemikiran kritis tentang pengetahuan agama dan mengambil bagian sebagai warga negara yang aktif dalam mencapai lebih banyak keadilan dalam masyarakat yang lebih besar.

Nalar Kritis Islam; Suatu Keniscayaan Dalam Pluralisme

Umat Islam di AS harus mampu menyampaikan pesan moral Islam dan berkontribusi pada kehidupan publik dalam masyarakat yang lebih besar. Karena itu, muslim harus mampu menerjemahkan ajaran islam ke dalam argumen yang rasional dan masuk akal. Bagi siswa muslim sangat penting untuk mengkaji ajaran moral Islam karena terkait dengan makna hidup yang baik, karena memiliki implikasi dan pengaruh terhadap kehidupan mereka dalam masyarakat¹⁵.

Pendidikan agama yang menitikberatkan pada doktrin, ritual, dan aspek transendental Islam saja tidak cukup jika dilihat dari perspektif pendidikan kewarganegaraan. Mereka harus mengakui keragaman dan mengetahui tradisi lokal dalam mendefinisikan kebaikan bersama sebagai ekstrak dari demokrasi.¹⁶ Oleh karena itu, umat Islam harus mampu menjelaskan mengapa mereka beriman dan menjelaskan ajaran moral islam dengan cara yang meyakinkan dan rasional. Jika pemeluk agama ingin moralnya dipertimbangkan dalam masyarakat demokratis dan sekuler, mereka tidak bisa hanya menggunakan bahasa dosa dan pahala. Mereka membutuhkan pengembangan bahasa akal, bukti, kedisninan, kekinian, dan bahasa ilmu.

Hidup di negara demokrasi dan liberal menempatkan nilai-nilai moral dan pedoman etika minoritas agama dipertaruhkan. Jika seseorang yang beragama ingin mempraktikkan kewarganegaraan yang setara dalam masyarakat, mereka kadang-kadang harus berpikir tentang agama mereka (klaim moral). Inilah yang menjadikan Muslim harus memikirkan kembali dan merasionalisasi perintah moral agama islam agar masuk akal dan dapat dimengerti oleh dunia sekuler dan orang yang tidak beragama.

Ibn Rusyd (filosof Islam abad 12), berpendapat dalam Fasl al-Maqal (The Decisive Treatise) bahwa Tuhan tidak membekali manusia dengan kode moral yang tidak dapat dipahami secara rasional. Tetapi perlu menggunakan spekulatif penalaran dan pemikiran filosofis dalam mempelajari dan menafsirkan maksud kekuatan hukum dalam Al-Qur'an, karena tidak semua orang menerima ajaran moral dari teks-teks agama sebagai kebenaran.¹⁷ Mengajarkan moral Islam harus siap dengan diskusi dan debat melalui penalaran teologis, filosofis, moral, dan ilmiah. Pendidikan agama semacam ini membantu siswa muslim untuk berpikir tentang agama mereka, bukan hanya sebagai tujuan individual tetapi sebagai sarana mencapai kehidupan yang lebih baik bagi umat Islam dan non-muslim bersama-sama Argumen di atas sesuai dengan pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan (demokrasi kebangsaan) karena mendorong siswa muslim mengembangkan keterampilan nalar mereka. Sekaligus mengambil bagian sebagai warga negara yang aktif dalam pengembangan ruang publik negara mereka. Dari perspektif religius hal ini dikatakan sebagai humanisme islam yang mendukung interpretasi kontemporer dan rasionalisasi teks agama¹⁸. Juga dapat disebut sebagai toleransi atas ikhtilaf (berbeda pendapat) dan pluralisme dalam komunitas muslim. Tujuan dari diskusi seperti itu di dalam kelas bukanlah untuk mencapai pemenang dan pecundang, tetapi untuk membiarkan siswa muslim berlatih dan meningkatkan keterampilan nalar serta moral mereka. Sekaligus menyiapkan mereka untuk menjadi warga negara aktif dalam masyarakat demokratis.

Pembelajaran pendidikan islam secara kritis sangat penting, mengingat banyaknya siswa muslim di AS lulus dari sekolah islam melanjutkan ke sekolah menengah umum. Di sekolah-sekolah ini mereka dihadapkan pada multikultural dan multi-agama. Karakteristik masyarakat yang lebih besar. Mereka kadang kala harus menjelaskan bahkan membela keyakinan agama dan moral mereka kepada teman sebaya, guru, dan staf. Siswa muslim di sekolah dasar islam harus bersiap untuk melanjutkan ke sekolah menengah umum yang permasalahannya lebih kompleks, diantaranya:

1. Islam bukanlah agama yang statis. Umat Islam diperkenankan mengembangkan tradisi dan memiliki aliran pemikiran yang berbeda.

2. Mereka mampu menggunakan penalaran filosofis, ilmiah, dan moralitas untuk membenarkan klaim agama dan moral untuk berpikir bagaimana mereka dapat berkontribusi pada kesejahteraan semua warga negara.
3. Kita hidup di dunia yang semakin terhubung dan saling membutuhkan orang lintas negara dan budaya. Sebagai konsekuensinya, umat islam harus mampu menjelaskan sikap agama dan moral mereka kepada orang lain baik itu Muslim atau non-muslim
4. Masuk akal bagi siswa untuk mempertanyakan ajaran islam dan mendefinisikan kembali identitas agama mereka dengan mencari lebih banyak bukti dan argumen yang kuat untuk mendukung pemahaman mereka tentang Islam.

Beberapa poin yang dibahas di atas (moral dan filosofis nalar), sebagian orang mungkin menganggap kurang tepat untuk anak-anak (tingkat pertama-enam). Karena siswa pada usia ini masih di awal belajar apa itu islam, bagaimana mengamalkannya, dan ajaran akhlak agama. Mereka mungkin belum mengembangkan kognitif dan intelektual untuk membahas persoalan abstrak dan moral.

Guru tidak dapat mengajari siswa untuk menjadi kritis kecuali mereka telah memperoleh beberapa pengetahuan tentang identitas dan komitmen. Namun sekolah islam di AS dituntut mampu memberi anak-anak lingkungan yang nyaman untuk mendiskusikan dan merasionalisasi ajaran akhlak islam. Misalnya mengapa beberapa perilaku dalam masyarakat dihukumi haram atau halal. Mampu bertamuh dan damai dengan orang-orang yang memeluk agama selain islam.

Keberagaman dan Keberagamaan; manifestasi politik dan budaya

Membedakan antara pembentukan akhlak islami dan aktualisasi akhlak sepanjang sejarah sangat penting, karena ini berkaitan dengan strategi dan tempat. Sepanjang perkembangan islam terdapat banyak aliran, pemikiran, ide, pendekatan dan interpretasi yang berbeda tentang apa itu Islam. Pengalaman hidup aktualisasi islam selalu berkaitan erat secara budaya, historis, kondisi, tempat dan waktu. Umat islam perlu membuat perbedaan antara teks keagamaan yang statis dan interpretasi yang dinamis terkait konteksnya. Untuk membahas historis islam harus bertumpu pada prinsip rasionalitas, egalitarianisme, kebebasan, keadilan, dan aktivisme sosial.

Berangkat dari argumen ini menunjukkan bahwa agama sebagai suatu sistem pengetahuan dapat digunakan atau disalah gunakan untuk tujuan politik. Ide kekerasan beralih agama memiliki beberapa manifestasi dalam sejarah manusia. Ada cukup bukti bahwa agama pernah digunakan atau disalah gunakan untuk memulai dan membenarkan konflik berdarah. Misalnya pembantaian yang

dilakukan orang-orang Israel pada zaman Alkitab, Perang Salib, kegilaan penyihir, dan gelombang kekerasan islam saat ini (terorisme).

Sejarah dunia juga banyak dipenuhi dengan contoh penggunaan agama untuk menindas orang lain, kefanatikan beragama, penganiayaan, intoleransi, konflik antar agama dan perang. Banyak orang di Balkan, Irlandia Utara, Kashmir, Uighyur, Myanmar, Indonesia, Afghanistan, Irak, Suriah, dan Mesir menderita pertumpahan darah konflik berdasarkan ideologi agama. Untuk itu, bagi siswa muslim sangat penting untuk memahami ilmu agama sebagai fenomena sejarah dan sosial politik yang dapat dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan dalam waktu tertentu dalam sejarah Islam.

Siswa muslim dapat berdiskusi dengan guru untuk membahas antara otoritas agama islam dan pemangku kepentingan politik untuk mendapatkan hak istimewa beberapa kelompok dan menyingkirkan yang lain. Misalnya, status kekhalifahan, prinsip syura dan ijtihad telah disalah gunakan oleh politisi dan pemuka agama untuk membenarkan aturan mereka, termasuk penindasan orang lain yang tidak setuju dengan mereka pada isu-isu hukum, politik, atau teologis. Fakta sejarah mengatakan banyak khalifah Umayyah dan dinasti Abbasiyah menggunakan Islam untuk memanipulasi orang dan untuk membenarkan rezim mereka.

Salafi menolak gagasan pemerintahan demokratis dengan asumsi bahwa khilafah adalah satu-satunya tatanan yang tepat dalam masyarakat Muslim. Namun analisa kritis terhadap Islam menunjukkan bahwa:

1. Al-Qur'an dan sunnah tidak membatasi satu cara untuk memilih pemimpin muslim (setelah wafatnya Nabi Muhammad). Khilafah bukanlah kekuasaan eksklusif satu-satunya cara untuk memimpin komunitas muslim dan umat islam dapat memilih apa yang cocok untuk mereka berdasarkan kebutuhan dan keadaan mereka (peluang ijtihad).
2. Tidak ada penentuan waktu yang dapat dihabiskan seorang khalifah untuk memerintah komunitas muslim dan ini juga terbuka untuk ijtihad.
3. Syariah Islam tidak menetapkan tanggung jawab profesional khalifah. Hal ini berarti terbuka ruang untuk diskusi dan multitafsir.

Analisa lebih lanjut menunjukkan bahwa meninggalkan musyawarah dan pemilihan kepemimpinan secara demokratis dimulai ketika Mu'awiyah bin Abu Sufyan (khalifah kedua dari Umayyah) mengambil alih kekhalifahan. Pembenaan kudeta militer di Mesir pada tahun 2013 dengan fatwa dari Dr. Ali Juma'a (otoritas agama islam yang lebih tinggi) adalah contoh lain dari penggunaan otoritas keagamaan untuk tujuan politik. Fatwa ini menyebabkan terjadinya banyak pembunuhan terhadap warga negara Mesir dan pengucilan Ikhwanul Muslimin sebagai pihak yang sah dalam politik Mesir. Kebangkitan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) di Timur Tengah dan pembunuhan mengerikan terhadap Muslim dan non-muslim atas

nama Tuhan juga memperjelas penggunaan islam untuk mendapatkan kekuasaan dan membenarkan agenda politik¹⁹

Berdasar contoh-contoh di atas, menunjukkan pentingnya mengembangkan sikap kritis siswa muslim membaca sejarah Islam, hubungan antara politik, agama, penindasan, dan otoritas keagamaan dalam masyarakat. Mereka perlu mengajukan pertanyaan minimal siapa yang berbicara atas nama Tuhan? siapa yang mengklaim otoritas atas interpretasi agama? mengapa, untuk kepentingan siapa, dan bagaimana mencapai atau melanggar cita-cita kebebasan, hak asasi manusia, dan demokrasi?

Demokrasi Islam; Cita-Cita Luhur Perdamaian

Islam liberal percaya bahwa sikap liberal telah tertanam dalam perintah-perintah ilahi. Siswa dan guru muslim dapat menyelidiki nilai-nilai liberal dan cita-cita demokrasi dalam sumber hukum Islam. Dengan begitu mereka telah berkontribusi untuk mencapai keadilan dalam masyarakat yang lebih besar. Misalnya, Al-Qur'an memotivasi pemeluknya untuk peduli terhadap orang-orang yang terpinggirkan (orang miskin, anak yatim, orang tertindas, musafir, dan orang-orang yang kelaparan). Berbeda dengan konsepsi ijtihad Salafi yang terbatas pada ulama tentang isu-isu kontroversial. Islam liberal menganggap semua orang dapat berkontribusi untuk sumbangsih saran dan ide untuk kepentingan publik. Bermusyawarah tentang apa yang bisa mereka lakukan dan bertanggung jawab atas keputusan bersama.

Muslim liberal adalah warga negara yang berorientasi pada masa kini yang lebih percaya pada aqli (pemikiran rasional) dan kurang pada naqli (pengetahuan dan interpretasi yang ditransmisikan oleh muslim terdahulu (ulama dan imam madzhab)) dalam memahami Islam dan kemungkinan implikasinya bagi kehidupan modern. Bentuk ijtihad liberal terjadi ketika ada kemungkinan bagi siswa mulai bertanya, memperdebatkan, melemahkan nalar kritis untuk mengartikulasikan dan mempraktikkan islam²⁰. Contoh ijtihad liberal dan progresif berkaitan dengan penafsiran makna jihad dalam Islam. Jihad berarti selain membela tanah air, ia juga perjuangan untuk kebebasan beragama, berekspresi, dan kesadaran untuk mencapai cita-cita kesetaraan. Jihad merupakan perlawanan mulia terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh muslim dan non-muslim.

Tidak seperti Salafisme yang memandang perbedaan sebagai ancaman bagi persatuan masyarakat muslim, muslim liberal percaya bahwa keragaman dapat memperkaya pemikiran islam dan mencerminkan keragaman budaya, politik, dan agama Islam. Jika dicermati Al-Qur'an menunjukkan banyak ayat yang menghargai perbedaan dan pluralisme. Dalam Surat Al Maidah 5: 48 Allah SWT berfirman “Untuk setiap umat di antara kamu, Kami telah menetapkan hukum (berbeda) dan cara hidup yang terang. Jika Allah berkehendak, Dia pasti

bisa menjadikan kalian semua satu komunitas tunggal: Tapi Allah hendak menguji kamu dengan apa yang telah dikaruniakan-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, dan kemudian Dia akan membuatmu benar-benar mengerti dengan apa yang kamu biasa perselisihkan” Ayat alqur`an ini menunjukkan bahwa keragaman dalam kehidupan manusia adalah suatu fakta. Orang harus bersaing dalam melakukan perbuatan baik dan tidak ada komunitas yang berhak mengklaim bahwa mereka memegang kebenaran tertinggi tentang makna hidup yang baik.

Ayat-ayat seperti “Kamu (Muhammad) bukan pemaksa terhadap mereka” (QS. Qaf 50: 45); “Tetapi apakah kamu akan memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman” (QS Yunus 10: 99); “dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan...Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberi tahukan kepada mereka tentang apa yang telah merekakerjakan” (QS. Al an`am 6: 108); dan “Tidak ada paksaan dalam agama (islam). Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat” (QS Al Baqarah 2: 256). Semua ayat itu menyoroti kebebasan beragama dan hak mereka untuk percaya atau tidak percaya pada Tuhan. Ini mengasumsikan bahwa Tuhan adalah hakim yang Maha Bijaksana.

Pemikiran politik Islam telah menghasilkan doktrin yang sesuai dengan doktrin barat tentang hak asasi manusia, pluralisme, dan demokrasi. Misalnya, penerapan prinsip syura dalam memilih khalifah berarti menekankan bahwa rakyat memiliki hak untuk mengontrol presiden mereka dan menasihatinya serta mengkritiknya. Ayat yang berbunyi “Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti” (Qs. Al Hujurat 49: 12) mengabarkan bahwa Allah mendorong manusia (bukan hanya muslim) untuk saling mengenal dan saling menghormati perbedaan dalam hal kebangsaan, ras, warna kulit, bahasa, dan jenis kelamin. Artinya, umat Islam diharapkan untuk mengakui bahwa semua orang adalah keluarga sesama umat manusia dan mencegah segala macam prasangka dan rasisme.

Selain itu, hidup dalam masyarakat demokratis menuntut umat Islam untuk mengetahui beberapa informasi dasar tentang agama lainnya di komunitas lokal mereka. Salah satu konsekuensi yang paling meresahkan dan mendesak dari buta agama adalah bahwa hal itu sering memicu prasangka dan antagonisme. Sehingga menghambat upaya yang bertujuan untuk mengedepankan

penghormatan terhadap keragaman, hidup berdampingan secara damai, dan upaya kerja sama di tingkat lokal, nasional, dan global.

Belajar tentang agama lain itu menjadi penting bagi umat muslim di AS, karena harus terbiasa untuk berbagi dengan non-muslim dalam kehidupannya. Mereka harus bisa mengkomunikasikan prinsip beragama beserta nilai-nilai religiusitasnya dan mendengarkan orang lain yang sekuler dengan cara yang hormat dan dialogis. Secara historis ada fluktuasi dalam hubungan antara muslim dan pemeluk agama lain (Kristen dan Yahudi).

Pada dasarnya kita dapat menemukan tiga sikap dalam hal ini: sikap posisi mewakili mazhab Salafi yang percaya bahwa hanya Islam yang bisa menyelamatkan; sikap inklusif, yang menegaskan bahwa Islam memiliki jalan benar untuk keselamatan; dan sikap posisi pluralis yang berpendapat bahwa tradisi agama yang berbeda-beda memungkinkan mengarah pada keselamatan bagi semua.

Muslim liberal cenderung tidak menghakimi non-muslim dan mereka memiliki sikap yang lebih pragmatis yang menghargai kebaikan non-muslim dan kontribusi mereka untuk kebaikan bersama. Mereka memiliki prinsip etika umum tentang bagaimana memperlakukan non-muslim dalam bermasyarakat. Misalnya, ayat "sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi`in, siapa saja yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. pada mereka tidak akan ada ketakutan dan mereka juga tidak akan bersedih hati" (QS. Al Baqarah 2: 62) mewakili paradigma inklusivis dengan kedamaian dan pesan tentang hubungan antara muslim dan pemeluk agama lain.

Belajar tentang agama lain di sekolah Islam di AS bertujuan untuk mengurangi buta agama di kalangan anak-anak muslim. Mendorong saling pengertian, toleransi, dan rasa hormat antara muslim dan warga negara yang percaya pada nilai-nilai budaya atau agama yang berbeda. Untuk membiarkan mereka terlibat dalam pertimbangan rasional tentang keyakinan dan nilai budaya yang berbeda dan konsepsi yang berbeda tentang kehidupan yang baik. Membantu mereka menavigasi identitas agama (dalam transisi mereka dari Islam ke sekolah umum) dan mampu terlibat dalam diskusi etis dengan rekan-rekan non-muslim mereka. Sebuah keputusan yang tepat jika melibatkan banyak orang, mendengarkan apa yang orang lain katakan, dan mengusulkan pandangan baik melalui perbedaan pendapat atau kesepakatan, itulah yang dimaksud dengan bertindak secara demokratis. Berbeda dengan hermeneutika teks-teks Islam yang berorientasi masa lalu, Islam liberal menolak kecenderungan menuju keterbelakangan dalam menafsirkan teks agama atau menyerukan modernitas. Muslim progresif percaya bahwa penalaran dikonstruksi secara sosial dan berbasis agama. Setiap ayat atau surat dalam Al-Qur'an berusaha untuk

memenuhi fungsi agama secara sosial dan etika. Hal ini berarti wahyu itu jika dipahami dengan benar, maka dapat menjadi dasar untuk inovasi, perubahan, dan adaptasi. Membiarkan keragaman melalui pemikiran kritis dan penalaran moral membantu siswa mengembangkan agama mereka sendiri dan identitas modern.

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Qomariah (2010) tentang dampak adanya Trans Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan memakai pendekatan fenomenologi. Fenomenologi digunakan agar dapat diketahui persepsi para pengemudi taksi terhadap kehadiran bus Trans Jakarta dan juga dapat diketahui dampak yang ditimbulkan bus Trans Jakarta terhadap taksi yang beroperasi di Jakarta. Serta diketahui strategi-strategi yang diterapkan para pengemudi taksi dalam menghadapi persaingan dengan bus Trans Jakarta maupun dengan pengemudi taksi lainnya.²²

KESIMPULAN

Menerapkan perspektif Islam liberal dan progresif dalam pendidikan mendorong siswa muslim untuk mengembangkan kapasitas berpikir kritis, penalaran moral, dan musyawarah demokratis. Mereka belajar untuk mengenali politik sebagai interpretasi agama, untuk mengkontekstualisasikan dan menghistoriskan pengetahuan Islam, dan bagaimana hal itu mungkin dipengaruhi oleh sosial, sejarah, dan politik pasukan. Satu lagi keterbatasan dalam menerapkan pendidikan Islam di Amerika Serikat berkaitan dengan kualitas guru. Setengah dari guru studi Islam tidak bersertifikat atau lisensi yang diperlukan untuk pendidikan. Pendidikan Islam liberal mendorong siswa muslim untuk membangun jiwa kritis dan sikap percaya diri tentang ajaran Islam sehingga mereka mengkomunikasikan agamanya secara cara yang meyakinkan dan deliberatif

BIBLIOGRAFI

- Tariq Ramadan, *Islam, the West and the Challenges of Modernity* (Kube Publishing Ltd, 2009); Najwan Saada, "Retheorizing Critical and Reflective Religious Education in Public Schools," *The International Journal of Religion and Spirituality in Society* 5, no. 4 (2015): 97–10)
- Ednan Aslan, "Citizenship Education and Islam," in *Islam and Citizenship Education* (Springer, 2015), 25–43.
- Ednan Aslan, "Citizenship Education and Islam," in *Islam and Citizenship Education* (Springer, 2015), 25–43.
- Ednan Aslan, "Citizenship Education and Islam," in *Islam and Citizenship Education* (Springer, 2015), 25–43.
- Kecia Ali and Oliver Leaman, *Islam: The Key Concepts: Islam: The Key Concepts* (Routledge, 2007).

Najwan Saada, "Rethorizing Critical and Reflective Religious Education in Public Schools," *The International Journal of Religion and Spirituality in Society* 5, no. 4 (2015): 97–108.

M. A. Al-Jabri, "The Religion, State and the Implementation of Sharia," Lebanon: Markez Derasat, 1996.

Yvonne Y. Haddad, Farid Senzai, and Jane I. Smith, *Educating the Muslims of America* (Oxford University Press, 2009).

Ramadan, *Islam, the West and the Challenges of Modernity*.

Nanang Faisol Hadi and Nur Kholik Afandi, "Literature Review Is A Part of Research," *Sultra Educational Journal* 1, no. 3 (2021): 64–71.

Kunzman, *Grappling with the Good*.

Nanang Faisol Hadi, "Kulturisasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Di Sekolah," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2016): 73–92.

Omid Safi, *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism* (Simon and Schuster, 2003).

Nanang Faisol Hadi and Iskandar Iskandar, "Art Education in the Perspective of the Quran and Hadith," *Sultra Educational Journal* 1, no. 3 (2021): 72–81

Nanang Faisol Hadi, "Mendesain Bangsa Yang Religius Dan Nasionalis Dari Bangku Sekolah," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 4, no. 1 (2018): 41–70

Moore, "American Academy of Religion Guidelines for Teaching About Religion in K-12 Public Schools in the United States

Al-Jabri, "The Religion, State and the Implementation of Sharia."

Fazlur Raḥmān and Ebrahim Moosa, *Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism* (Oneworld, 2000).

Hasan Al-Alkim, "Islam and Democracy Mutually Reinforcing or Incompatible," London: Center for the Study of Democracy, U of Westminster, 1993.

Raḥmān and Moosa, *Revival and Reform in Islam*.

Faturahman, B. M. (2018, September). Pluralisme agama dan modernitas pembangunan. In *Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat* (Vol. 1, pp. 20-41) https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24084/3/Anang%20Lukman%20Afandi_NoRestriction.pdf



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).